

PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA DI DESA
WONOPLINTAHAN KECAMATAN
PRAMBON KABUPATEN
SIDOARJO
by Mutmainnah ..

Submission date: 06-Feb-2022 02:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 1755807230

File name: Ekonomi_dan_Bisnis_1221800141_Mutmainnah.docx (525.35K)

Word count: 3095

Character count: 22560

**PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI DESA
WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO**

Mutmainnah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
Email: mutmainnah735@gmail.com

IBK.Bayangkara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
Email: bayibeka@gmail.com

ABSTRACT

Village financial management is the activity of managing village finances for the better. Village financial management is based on regulations and the ability of human resources to manage. According to the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 explains that village financial management is a whole activity including the Planning stage, Implementation stage, Administration stage and Accountability stage. This study aims to find out how the financial management of the Village Fund in Wonoplintahan Village, Prambon District, Sidoarjo Regency, is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. The results show that in the planning stage, implementation stage, administration stage and accountability stage in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. In the accountability reporting stage, it has been easier to make reports because they have used the SISKEUDES application. As for the obstacles experienced by the community's misunderstanding of information in the open era, which is easy for them to get, but they do not understand the flow of Village Financial Management and the existence of various unexpected conditions such as weather conditions which become obstacles in road construction activities so that it is not timely in completion.

Keywords : Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Accountability

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan mengatur keuangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan serta kemampuan sumber daya manusia yang mengelola. Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan, tahap Penatausahaan dan tahap Pertanggungjawaban. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, apakah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan, tahap Penatausahaan dan tahap Pertanggungjawaban sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam tahap Pelaporan Pertanggungjawaban sudah dimudahkan dalam pembuatan laporan dikarenakan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Adapun kendala yang dialami kesalahan fahaman masyarakat atas informasi di era terbuka yang mudah mereka dapatkan namun kurang memahami alur Pengelolaan Keuangan Desa dan adanya berbagai kondisi yang tidak terduga seperti kondisi cuaca yang menjadi kendala dalam kegiatan pembangunan jalan sehingga kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat untuk mengatur pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Pemerintah Desa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan desa agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa dengan tertib dan disiplin. Masyarakat membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. Maka dari itu pengelolaan keuangan desa tersebut diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memilih objek penelitian di Wonoprintahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perencanaan keuangan desa di Desa Wonoprintahan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI DESA WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas

jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah digunakan sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014. Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab tentang ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pasal pasal yang mengukur Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan pada Pasal 20 – Pasal 23, Pelaksanaan pada Pasal 24 – Pasal 34, Penatausahaan pada Pasal 35 - Pasal 36, Pelaporan pada Pasal 37 dan Pertanggungjawaban pada Pasal 38 – Pasal 43.

4. Desa

Menurut Prof Drs. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul Pemerintah Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa adalah daerah yang

memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan konsep otonomi daerah, termasuk yang terkait dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa selalu memperhatikan dan membangun desa melalui otonomi pemerintah desa serta peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

5. Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dengan demikian, dalam pelaksanaannya sebagian kekuasaan dilimpahkan kepada penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bersama kepala desa dan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris desa
- c. Kepala seksi
- d. Bendahara Desa

7. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa terkait dengan pemerintah pusat / provinsi / kabupaten / kota, pokok bahasan pelaksanaan di desa, Struktur APBDesa dan laporannya. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan bekerja tanpa aturan

pemerintahan desa yang baik. Karena itu bahwa, partisipasi pihak luar pemerintah desa dan instansi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti kepala desa, tokoh agama, perwakilan perempuan, perwakilan dari petani, wakil rakyat miskin dan orang lain yang perlu terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

8. *Asas Pengelolaan Keuangan Desa*

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :

- a. ³ **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- c. ³ **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

METODE PENELITIAN

1. *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan Studi Kasus. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Metode kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena.

2. *Tempat Penelitian*

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon

Kabupaten Sidoarjo.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif tentang objek penelitian yaitu laporan keuangan pemerintah desa yang diterima dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa data diperoleh langsung dari objek penelitian seperti mendapatkan laporan keuangan desa. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dari literatur-literatur dan buku-buku yang bersangkutan dengan APBDesa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Teknik Observasi, adalah dengan melakukan kunjungan atau observasi langsung pada objek penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- b. Teknik wawancara, merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pemerintah desa mengenai data perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa yang ada sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- c. Teknik Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan, arsip berupa tulisan.

5. Definisi Variabel dan Variabel Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Laporan Keuangan Pemerintah Desa adalah sebuah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam bendahara desa rangka penatausahaan di dalam Pengelolaan keuangan desa.

Operasional dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Desa Wonoplintaha dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban yang menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggambarkan objek yang diteliti dan Laporan Keuangan Desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban APBDesa. Data ini dibandingkan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Woplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wonoplintahan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Typologi wilayah Desa Wonoplintahan merupakan Dataran rendah dengan luas wilayah 199,9 km². Penduduk Desa Wonoplintahan 5838 jiwa. Kepala Desa Yaitub Joko Setyanggono, ST, Sekertaris Desa yaitu Nur Kasan. Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo pendapatan desa sebesar Rp 2.040.755.212 yang terdiri dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak & retribusi, bantuan keuangan dll . Maka dari itu memiliki kewajiban untuk mengelola Dana Desa (DD) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014. Hasil penelitian ini memuat temuan-temuan penelitian dapat berupa tabel, grafik atau bagan dalam rangka menjelaskan hasil penelitian secara verbal tanpa mengulangi secara naratif atas isi dari tabel, grafik atau bagan tersebut.

- Tahap Perencanaan

Hasil Penelitian pengelolaan keuangan desa wonoplintahan pada tahap perencanaan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa wonoplintahan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan

menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). tatacara penyusunan SPP : Berdasarkan RAB, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi; Sekertaris desa melakukan Verifikasi terhadap SPP; Kepala Seksi menyampaikan dokumentasi SPP yang telah diverifikasi kepada Kepala Desa; Kepala Desa menyetujui SPP dan pembayaran selanjutnya dilakukan.

Tabel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Wonoplintahan Tahun 2021

PEMERINTAH DESA WONOPLINTAHAN							
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN							
TAHUN ANGGARAN 2021							
Bidang		: 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAAAN DESA			Nomor : 0337/SPP/02.2014/2021		
Sub Bidang		: 2.2. Sub Bidang Kesehatan					
Kegiatan		: 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mdn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insektif)					
Waktu Pelaksanaan		: 12 Bulan					
Output/Keluaran		: Tersedia Sarana Posyandu Balita/Lansia					
No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan / Minum)	4.530.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	30.000,00
2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.395.000,00	5.760.000,00	800.000,00	6.560.000,00	11.835.000,00
4	5.2.3.01.	Belanja Penilaian Dinas Dalam Kabupaten / Kota	2.467.500,00	2.647.500,00	0,00	2.647.000,00	0,00
5	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	16.790.000,00	16.770.000,00	0,00	16.770.000,00	20.000,00
Jumlah			42.662.500,00	25.177.500,00	5.600.000,00	30.777.500,00	11.885.000,00
Disetujui untuk dibayarkan			Telah dibayar lunas		Telah dilakukan verifikasi		Pelaksana Kegiatan,
KEPALA DESA WONOPLINTAHAN			/R KEUANGAN DESA WONOPLINTAH		SEKDES WONOPLINTAHAN		
JOKO SETYANGGONO,ST			JUNAEDI, SH		NURKASAN		HERMAWAN STYO ANGGONO

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

3. Tahap Ketiga Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran yang menimbulkan biaya pengeluaran kegiatan dengan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di desa. Buku kas pembantu desa wonoplintah tahun 2021 Buku Kas Pembantu kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakuakn oleh pelaksana kegiatan.

Tabel Buku Kas Pembantu Desa Wonoplintahan Tahun 2021

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dan Kas (Rp)	Pengeluaran (Rp)		Pengambilan ke Kas Desa (Rp)	Saldo Kas (Rp)
					Belanja Brak dan Jasa	Belanja Modal		
1	04-02-2021	0021 SPP-02 2014 2021	PENYELenggara POSTANDU	2.647.500,00	0,00	0,00	0,00	2.647.500,00
2	03-02-2021	0111 SPP-02 2014 2021	PENYELenggara POSTANDU	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	12.857.500,00
3	04-02-2021	0111 SPP-02 2014 2021	PENYELenggara POSTANDU	880.000,00	0,00	0,00	0,00	13.737.500,00
4	08-08-2021	184 SPP-02 2014 2021	PENYELenggara POSTANDU	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.237.500,00
5	02-08-2021	0111 SPP-02 2014 2021	PENYELenggara POSTANDU	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.837.500,00
6	14-10-2021	0185 SPP-02 2014 2021	PENYELenggara POSTANDU	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	20.557.500,00
7	18-11-2021	0130 SPP-02 2014 2021	PENYELenggara POSTANDU	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.057.500,00
8	21-11-2021	0131 SPP-02 2014 2021	PENYELenggara POSTANDU	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.557.500,00
9	04-02-2021	00043 SPP-02 2014 2021	Belanja Maksimal Tambahan Desa	2.600.000,00	0,00	2.647.500,00	0,00	22.910.000,00
10	01-02-2021	00128 SPP-02 2014 2021	Belanja Bantuan Transportasi Sediaan Perantara Baku	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	19.210.000,00
11	01-02-2021	00129 SPP-02 2014 2021	Belanja Maksimal Perantara Gasi Baku	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	15.160.000,00
12	01-02-2021	00131 SPP-02 2014 2021	Belanja Bantuan Transportasi Perantara	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	14.110.000,00
13	30-04-2021	00131 R W F02 2014 2021	Belanja Maksimal Perantara Gasi	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	12.710.000,00
14	03-02-2021	00130 R W F02 2014 2021	Belanja Bantuan Transportasi Sediaan Perantara Baku	0,00	0,00	750.000,00	0,00	11.960.000,00
15	02-02-2021	00131 R W F02 2014 2021	Belanja Bantuan Transportasi Perantara	0,00	0,00	310.000,00	0,00	11.650.000,00
16	04-08-2021	00104 R W F02 2014 2021	Belanja Bantuan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.150.000,00
17	30-07-2021	00188 R W F02 2014 2021	Belanja Maksimal Perantara Gasi Baku	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	6.150.000,00
18	30-07-2021	00189 R W F02 2014 2021	Belanja Maksimal Perantara Gasi	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	4.550.000,00
19	13-10-2021	00498 R W F02 2014 2021	Belanja Maksimal Tambahan Desa	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	2.850.000,00
20	13-11-2021	00548 R W F02 2014 2021	Belanja Maksimal Perantara Gasi	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	500.000,00
21	18-11-2021	04598 R W F02 2014 2021	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	1.000.000,00
22	18-11-2021	00181 R W F02 2014 2021	Belanja Honor Pagar	0,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00
23	21-11-2021	00181 R W F02 2014 2021	Belanja Honor Pagar sesuai Kegiatan	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Jumlah				16.777.500,00	36.777.500,00	36.777.500,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran, dan Saldo Kas				16.777.500,00	36.777.500,00	36.777.500,00	0,00	0,00

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

• Tahap Penatausahaan

Hasil Penelitian penatausahaan pengelolaan keuangan desa wonoplintahan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta penutupan pembukuan setiap akhir bulan dengan tertib. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan Pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

- a. Buku Kas Umum berikut tabel buku kas umum desa wonoplintahan 2021 yang berisikan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas, sebelum ditandatangani kepala desa wajib diperiksa dan diparaf oleh sekretaris desa.

Tabel Buku Kas Umum Desa Wonoplintahan Tahun 2021

BUKU KAS UMUM PEMERINTAH DESA WONOPINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2021								
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR			Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021					
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-2021		Saldo Setorannya	235.315.426,80	0,00		235.315.426,80	235.315.426,80
2	18-01-2021		Saldo Pembelian					
		7.1.1.01.	Belanja Perawatan	818.182,00	0,00	00006/KW/02.2014/2021	818.182,00	236.133.608,80
		7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	236.256.335,80
3	18-01-2021		Belanja Uang Kewasudanan	39.273,00	0,00	00319/KW/02.2014/2021	39.273,00	236.295.608,80
		7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23	196.364,00	0,00		196.364,00	236.491.972,80
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah/Makan Rajasa 2020					
4	18-01-2021		Kas di Bendahara	15.000.000,00	15.000.000,00			236.491.972,80
5	20-01-2021		PENYANGGULANGAN KEADILAN MENDESAK	0,00	3.000.000,00	00005/SPP/02.2014/2021	3.000.000,00	233.491.972,80
		5.4.1.01.	Belanja Titah Tertaga					
6	20-01-2021		PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DESA	0,00	2.512.500,00	00002/SPP/02.2014/2021	2.512.500,00	230.979.472,80
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Perawatan/Layanan					
7	20-01-2021		PENYEDIA SARANA (ASBET TETAP)	0,00	12.050.000,00	00005/SPP/02.2014/2021	12.050.000,00	218.929.472,80
		5.3.2.05.	Belanja Modal Perbaikan Komputer					
		5.3.2.05.	PENYEDIA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA					
8	20-01-2021		Belanja Modal Perbaikan Komputer	0,00	1.012.500,00	00004/SPP/02.2014/2021	1.012.500,00	217.916.972,80
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Insentif Pelayanan Desa					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik					
				402.800,00			402.800,00	213.994.172,80

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

- b. Buku Kas Pembantu Pajak yang berisikan penerimaan atau pengeluaran kas
- c. Buku Bank Desa Wonoplintahan 2021 yang berisikan jumlah setor, jumlah bunga bank, jumlah penarikan, jumlah pajak dan biaya administrasi.

Tabel Buku Bank Desa Wonoplintahan Tahun 2021

BUKU PEMBANTU BANK PEMERINTAH DESA WONOPINTAHAN KECAMATAN PRAMBON TAHUN ANGGARAN 2021									
						BULAN : November 2021 NAMA BAN : DPR DELTA ARTHA NO.REK : 201100001623			
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Penerimaan		Pengeluaran		Saldo (Rupiah)	
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10/11/2021	Pendahan Saldo		1.907.203.889,79	0,00	1.835.685.554,00	0,00	0,00	71.518.335,79
2	25/11/2021	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	0336/SPP/02.2014/2021	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	64.518.335,79
3	25/11/2021	PENYELENGGARAAN POSYANDU	0337/SPP/02.2014/2021	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	58.918.335,79
4	25/11/2021	PEMELIHARAAN GEDUNG-PRASARANA	0338/SPP/02.2014/2021	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	56.418.335,79
5	25/11/2021	PENYEDIA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	0339/SPP/02.2014/2021	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	54.528.335,79
6	30/11/2021	Bunga Bank November 2021	0050/TB/P/02.2014/2021	47.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575.356,79
7	01/12/2021	ADD (DAU) Bulan November 2021	0051/TB/PO/02.2014/2021	34.658.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.234.143,79
8	01/12/2021	PENGHASILAN JETAP KEPALA DESA	0340/SPP/02.2014/2021	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	85.584.143,79
9	01/12/2021	PENGHASILAN JETAP PERANGKAT DESA	0341/SPP/02.2014/2021	0,00	0,00	24.455.000,00	0,00	0,00	61.129.143,79
		Total Transaksi Bulan ini		34.705.808,00	0,00	45.095.000,00	0,00	0,00	
		Total Transaksi Kumulatif		1.941.909.697,79	0,00	1.880.780.554,00	0,00	0,00	61.129.143,79

DUSUN PLINTAHAN, 06 Desember 2021
LUR.KEUANGAN DESA WONOPINTAHAN
JUNAEDI,SH

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

- Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban

Hasil Penelitian Pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa wonoplintahan adalah tahap pertama Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa : Laporan Semester Pertama

dan Laporan Semester kedua. Berikut laporan keuangan semester pertama dan semester kedua desa wonoplintahan tahun 2021 yang berisikan susunan kode rekening dan uraian pelaksanaan APBDesa.

Semester Pertama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
			1	2	3	4	
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.600.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	50,00	6.300.000,00
01.05	Sub Bidang Perencanaan	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
01.05.90	Jasa Penyelenggaraan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
6.2	Belanja Barang dan Jasa	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
6.2.6	Belanja Operasional Perencanaan	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
5.2.2.7	Belanja jasa penyelenggaraan Ijin/Pajak	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	18.726.880,176,00	0,00	282.042,226,00	282.042,226,00	26,27	18.444.837,950,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
02.01.01	Penyenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQM sd/arah Non-formal	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
6.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
6.2.1	Belanja Jasa Honorarium	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
5.2.2.91	Belanja Jasa Pelaksanaan Pendidikan Desa	26.500.000,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	8.800.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	99,56	40.000,00
02.02.01	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa/Paludus M.lik. Desa (Obat,kesan)	8.800.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	99,56	40.000,00
6.2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	99,56	40.000,00
6.2.1	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Belanja Jasa Honorarium	8.800.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	99,56	40.000,00
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	99,56	40.000,00
6.2.2.6	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.395.000,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	31,37	12.635.000,00

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

Semester kedua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
			1	2	3	4	
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.600.000,00	6.300.000,00	3.250.000,00	11.550.000,00	91,67	1.050.000,00
01.05	Sub Bidang Perencanaan	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
01.05.90	Jasa Penyelenggaraan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
6.2	Belanja Barang dan Jasa	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
6.2.6	Belanja Operasional Perencanaan	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
5.2.2.7	Belanja jasa penyelenggaraan Ijin/Pajak	13.614.855,57	13.614.855,57	0,00	0,00	0,00	13.614.855,57
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	18.726.880,176,00	282.042,226,00	139.013.653,816	421.056.879,816	39,16	18.444.837,950,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
02.01.01	Penyenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQM sd/arah Non-formal	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
6.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
6.2.1	Belanja Jasa Honorarium	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
5.2.2.91	Belanja Jasa Pelaksanaan Pendidikan Desa	26.500.000,00	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	99,92	20.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	8.800.000,00	8.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	92,15	28.000,00
02.02.01	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa/Paludus M.lik. Desa (Obat,kesan)	8.800.000,00	8.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	92,15	28.000,00
6.2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	92,15	490.000,00
6.2.1	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Belanja Jasa Honorarium	8.800.000,00	8.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	92,15	490.000,00
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.760.000,00	2.250.000,00	8.010.000,00	92,15	490.000,00
6.2.2.6	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.395.000,00	5.760.000,00	16.420.000,00	30.777.800,00	72,14	11.988.000,00
6.2	Belanja Barang dan Jasa	42.662.800,00	18.387.800,00	16.420.000,00	30.777.800,00	72,14	11.988.000,00
6.2.1	Belanja Jasa Honorarium	42.662.800,00	18.387.800,00	16.420.000,00	30.777.800,00	72,14	11.988.000,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Bahan/Barang)	4.530.000,00	4.530.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	99,34	30.000,00
6.2.2	Belanja Jasa Honorarium	12.895.000,00	5.760.000,00	2.100.000,00	4.268.000,00	26,69	11.925.000,00
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
6.2.2.6	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.395.000,00	5.760.000,00	800.000,00	6.560.000,00	35,66	11.895.000,00

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa wonoplintahan tahun 2021 yang berisikan pendapatan, belanja, pembiayaan.

Tabel Laporan Peranggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa
Wonoplintahan tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA WONOPINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber dana: DDS Dana Desa (Drooping APBN)		Realisasi s.d 30/11/2021		
Kode Rekr	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	962.093.000,00	800.574.400,00	161.518.600,00
4.2.1	Dana Desa	962.093.000,00	800.574.400,00	161.518.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN	962.093.000,00	800.574.400,00	161.518.600,00
5.	BELANJA			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	73.965.000,00	70.064.000,00	3.901.000,00
01.02	Penyediaan Sarana/Prasarana Pemerintahan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
01.02.02.	Pembelian Barang/Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.6	Belanja Pembelian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.6.03	Belanja Pembelian Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
01.03	Administrasi Keseluruhan, Pencatatan Sipil, Statistik, Pemyasrasaan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipin)	61.665.000,00	58.664.000,00	3.061.000,00
01.03.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.665.000,00	58.664.000,00	3.061.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.665.000,00	46.664.000,00	61.000,00
5.2.1.	Belanja Barang dan Perengkapan	16.515.000,00	16.473.000,00	42.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.215.000,00	4.185.000,00	30.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honevment/Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honevment/Petugas	28.050.000,00	28.031.000,00	19.000,00
5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Perlatan Elektronik dan Alat Studio	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honevment	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honevment/Petugas	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00
02.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	217.872.500,00	123.684.800,00	93.987.700,00
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honevment	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Pelaksanaan Pendidikan Desa	26.500.000,00	26.480.000,00	20.000,00
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	84.862.500,00	59.773.500,00	25.129.000,00
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Palindes MIBK Desa	8.500.000,00	8.010.000,00	490.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.010.000,00	490.000,00
5.2.1	Belanja Barang dan Perengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honevment	8.500.000,00	8.010.000,00	490.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honevment Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honevment/Petugas	8.500.000,00	8.010.000,00	490.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Poyasandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsi, Inovasi)	42.662.500,00	30.777.500,00	11.885.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.662.500,00	30.777.500,00	11.885.000,00
5.2.1	Belanja Barang dan Perengkapan	4.530.000,00	4.500.000,00	30.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang dan Konsumsi (Makan/Minum)	4.530.000,00	4.500.000,00	30.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honevment	18.695.000,00	6.860.000,00	11.835.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honevment Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honevment/Petugas	18.395.000,00	6.560.000,00	11.835.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.647.500,00	2.647.500,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.647.500,00	2.647.500,00	0,00
5.2.3.	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan Kepala Masyarakat	16.790.000,00	16.770.000,00	20.000,00
5.2.3.09.	Belanja Barang untuk Diarahkan kepada Masyarakat Lainnya	16.790.000,00	16.770.000,00	20.000,00
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.300.000,00	18.596.000,00	11.704.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	18.596.000,00	11.704.000,00
5.2.1	Belanja Barang dan Perengkapan	6.850.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/keUang Tabung	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbr-umbul/Spondok	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honevment	8.200.000,00	1.200.000,00	7.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honevment Tim Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	300.000,00	1.300.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honevment/Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honevment/Petugas	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.250.000,00	13.946.000,00	1.304.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	15.250.000,00	13.946.000,00	1.304.000,00
02.02.06	Pengembangan Berencana atau Bina Keluarga Balita (BKBB)	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang dan Perengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang dan Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

- Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan desa wonoplintahan tahun 2021, yang berisikan uraian aset desa, uang kas, piutang desa,

persediaan, kewajiban ekuitas.

Tabel Kekayaan Milik Desa Wonoplintahan Tahun 2021

PEMERINTAH DESA WONOPLINTAHAN LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021			
KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (RP)
1	ASET		
1.1	Aset Lancar		
1.1.1	Kas dan Bank	66.356.315,80	235.315.426,80
1.1.1.01	Kas di Bendahara Desa	-18.283.721,99	45.419.409,01
1.1.1.02	Rekening Kas Desa	84.640.037,79	189.896.017,79
1.1.2	Piutang		
1.1.2.01	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02	Piutang Sewa Perakatan	0,00	0,00
1.1.2.03	Piutang Sewa Perakatan	0,00	0,00
1.1.2.04	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01	Persediaan Benda Pos dan Material	0,00	0,00
1.1.3.02	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03	Persediaan Bungkusan dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06	Persediaan Alat-Alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08	Persediaan Barang Untuk Dibagikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	66.356.315,80	235.315.426,80
1.2	Investasi		
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah/Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3	Aset Tetap		
1.3.1	Tanah	0,00	0,00
1.3.2	Perakatan dan Mesin	46.520.000,00	0,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	134.230.653,00	0,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	162.540.425,00	0,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8	Akumulasi Penyusutan Aktivitas Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	343.291.078,00	0,00
1.4	Dana Cadangan		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5	Aset Lain-lain	25.000.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	25.000.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	434.647.393,80	235.315.426,80
2	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Hutang Pajak	4.010.354,00	0,00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.216.818,00	0,00
2.1.5	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.227.172,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.227.172,00	0,00
3	EKUITAS		
3.1	Ekuitas		
3.1.1	Ekuitas	603.606.504,80	235.315.426,80
3.1.2	Ekuitas SAL	-174.186.283,00	0,00
	Jumlah Ekuitas	429.420.221,80	235.315.426,80
	JUMLAH EKUITAS	429.420.221,80	235.315.426,80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	429.420.221,80	235.315.426,80

SUN PLINTAHAN, 06 Desember 20
KEPALA DESA WONOPLINTAHAN

JOKO SETYANGGONO,ST

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Desa Wonoplintahan Tahun 2021

3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Desa Wonoprintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014. Dari hasil penelitian untuk tahap Pelaporan Pertanggungjawaban sudah dimudahkan dalam pembuatan laporan dikarenakan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan kesimpulan penelitian peneliti memberika saran agar tidak terjadinya kesalah fahaman antara masyarakat maka dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat diinformasikan secara tertulis dengan lebih detail dan terperinci lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. 2020. Pengertian Akuntansi Sektor Publik, Karakteristik, Tujuan dan Ruang Lingkup. [https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=487#:~:text=Backtiar%20Arif%20dkk%20\(2002%3A3,penafsiran%20atas%20informasi%20keuangan%20tersebut.](https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=487#:~:text=Backtiar%20Arif%20dkk%20(2002%3A3,penafsiran%20atas%20informasi%20keuangan%20tersebut.) (Diakses 13 Desember 2021).
- Admin.2018. Definisi Desa Menurut Para Ahli. <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (Diakses 13 Desember 2021)
- Admsykal.2021. Kendala Terhadap Pengelolaan Dana Desa. <https://syakal.iainkediri.ac.id/kendala-terhadap-pengelolaan-dana-desa/>. (Diakses 14 Januari 2022)
- Afdal.2020. 6 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik Dalam Organisasi. <https://www.ladfanidkonsultindo.com/2020/04/19/6-peran-akuntansi-manajemen-sektor-publik-dalam-organisasi/> (diakses 30 Desember 2021).
- AyiSumarna.2015. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. <https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html?m=1>. (diakses 06 Januari 2022).
- BambangParlupi. 2020. Pengertian Desa, Otonomi dan wewenang. <https://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-pembangunan-berkelanjutan/pengertian-desa-otonomi-dan-wewenang.html#gsc.tab=0> (Diakses 13 Desember 2021).
- \
- BPKP.2015. Petunjuk Pelaksana Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Deepublist.2020. Pengertian Variabel Penelitian dan Jenis-Jenisnya.

2019-11-05-48737eb7/. (Diakses 06 Januari 2022).

Puspasari, Oktaviani Rita, and Dendi Purnama. Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi* 2.2 (2018): 145-159.

Sululing, Siswadi, Haruni Ode, and Muhammad Gifari Sono. "ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*. Vol. 1. No. 1. 2018.

Suryaden.2015.Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-2014-pengelolaan-keuangan-desa?amp>. (diakses 06 Januari 2022).

Tumbelaka, Herlen Indrakartika Angela, Inggriani Elim, and Meily Kalalo. Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal* 2.2 (2020): 74-86.

Wikeupedia.2018.Pengelolaan Keuangan Desa. <http://wikeuangan.com/pengelolaan-keuangan-desa-perencanaan-detail-404704.html>. (diakses 30 Desember 2021). A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI DESA WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net Internet Source	6%
2	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	5%
3	adoc.pub Internet Source	5%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 137 words

Exclude bibliography On